

**ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI
FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK
HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA
PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN DI
KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

GALIH PRAMILU BAKTI
NIM. C2B005172

**ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2012**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Galih Pramilu Bakti

Nomor Induk Mahasiswa : C2B005172

Fakultas : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK
DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP ANGKA MELEK HURUF
PEREMPUAN DAN ANGKA
PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Dosen Pembimbing : Johanna Maria Kodoatie, SE., MEc., Ph.D

Semarang, 09 Agustus 2012

Dosen Pembimbing,

(Johanna Maria Kodoatie, SE., M.Ec., Ph.D)

NIP. 196406121990012001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Galih Pramilu Bakti
Nomor Induk Mahasiswa : C2B005172
Fakultas : Ekonomika dan Bisnis / Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan

Judul Skripsi : **ANALISIS DAMPAK
DESENTRALISASI FISKAL
TERHADAP ANGKA MELEK HURUF
PEREMPUAN DAN ANGKA
PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 05 Juni 2012

Tim Penguji :

1. Dra. Johanna Maria K, Mec, Ph.D. (.....)
2. Achma Hendra S, SE. Msi. (.....)
3. Banatul Hayati, SE. Msi (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Galih Pramilu Bakti, menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : **“ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**, adalah tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 09 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

Galih Pramilu Bakti

NIM. C2B 005 172

MOTTO

Dan apabila dikatakan “berdirilahkamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat (Q.S Al Mujadilah 11)

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat kepada orang lain
(Hadits)

Education s the most powerful weapon which you can use to change the world
(Nelson Mandela)

Kritis bukan berarti khianat, taat bukan berarti taklid (anonim)

PERSEMBAHAN

Penelitian ini saya persembahkan kepada kedua orang tua. Merekalah orang yang paling saya muliakan di dunia dan akhirat kelak. Terima kasih untuk segalanya, “Ya Allah jadikanlah aku termasuk anak yang shaleh, yang selalu mendoakan Bapak dan Ibu kebaikan dunia dan akhirat, Amieen....”

ABSTRACT

Fiscal decentralization has been adopted worldwide. The common motive of many countries adopted fiscal decentralization because of have potential to improve the performance of the public sector. Since the UU No 22 tahun 1999 and UU No 25 tahun 1999 released and revised by UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 impact local government in Indonesia, because they have role to decide local government finance. It also assumed that local government improving public services for women. That measured by women access into education.

This paper use panel data which analyze with Fixed Effect Methods model. Data series on local governments of Daerah Istimewa Yogyakarta is constructed for the years 2004-2009. The variabel is local revenue, government expenditure, population, per capita income, amount of highschool.

Finding suggest that fiscal decentralization which analyze with Fixed Effect Methods Model does not have significant influence to women education access in Daerah Istimewa Yogyakarta.

Keywords: Fiscal Decentralization, Panel Data, Fixed Effect Methods, Gender, Yogyakarta

ABSTRAK

Desentralisasi Fiskal dalam beberapa dekade terakhir diterapkan di berbagai belahan dunia. Desentralisasi fiskal banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena diyakini mampu meningkatkan kinerja di sektor publik. Semenjak diterbitkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 Indonesia yang kemudian disempurnakan dengan UU No 32 tahun 2004 dan UU No 33 tahun 2004 memiliki dampak bahwa pemerintah daerah di Indonesia mempunyai andil dalam mengatur keuangan daerahnya sendiri. Dengan asumsi kinerja sektor publik semakin meningkat, desentralisasi fiskal juga diharapkan meningkatkan pelayanan publik khususnya kepada perempuan. Dalam hal ini diukur melalui akses perempuan terhadap pendidikan.

Penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan model Fixed Effect Methods. Data yang dipergunakan adalah data sekunder pendapatan asli daerah, pengeluaran daerah, angka melek huruf perempuan, angka partisipasi sekolah, pendapatan per kapita, populasi penduduk, dan jumlah SMA/MA di kabupaten/kota Provinsi DIY dari tahun 2004-2009.

Berdasarkan hasil analisis dari data panel dengan model Fixed Effect Methods menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan dan pengeluaran tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan di kabupaten/kota Provinsi DIY.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Angka Melek Huruf Perempuan, Gender, Data Panel, Fixed Effect Methods, Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga tersusunlah skripsi yang berjudul **“ANALISIS DAMPAK DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP ANGKA MELEK HURUF PEREMPUAN DAN ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH PEREMPUAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”** terselesaikannya skripsi ini merupakan bentuk kenikmatan yang diberikan kepada penulis. Semoga cita-cita untuk menjadi manusia bermanfaat dapat terwujudkan dan semoga Allah SWT senantiasa menaungi perjalanan untuk mewujudkannya dengan rahmat dan kebaikan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah mendapatkan bantuan, pengarahan, dukungan, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H. Mohammad Nasir, M.Si, Akt., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Johanna Maria Kodoatie, SE., MEC., Ph.D selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan, arahan dan motivasi demi terwujudnya skripsi ini. Mohon maaf sudah begitu banyak menyia-nyiakkan waktu yang Ibu luangkan dalam proses penyusunan

skripsi ini. Sebuah keberuntungan tersendiri dapat mendapat bimbingan dari Ibu.

3. Bapak Achma Hendra Setiawan, SE, M.Si, selaku dosen wali yang telah banyak memberikan perhatian terhadap kelancaran studi penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan kepribadian selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Ucapan terima kasih juga ditunjukkan kepada orang-orang terdekat penulis yang telah memberikan dukungan baik moral, spiritual, maupun material selama proses penyusunan skripsi ini dan selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang, terutama untuk :

1. Ibu dan Bapak tercinta, yang jasanya tak akan terbalas sampai kapanpun. Terima kasih atas segala pengorbanan, kasih sayang, hingga kepercayaan yang tak terhingga agar seluruh putra-putrinya dapat berhasil di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah SWT membalas semua yang Ibu dan Bapak berikan dapat dibalas dengan hal yang lebih baik dari-Nya. Amien.

2. Keluarga besar Trah Setrodikromo di Yogyakarta dan sekitarnya, yang selalu memberikan do'a dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian ini.

3. Kawan-kawan di Fakultas Ekonomi khususnya di jurusan IESP Angkatan 2005, Fathul, Nauval, Erwin, Adit, Taufik dan puluhan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Atas semua kebersamaan selama masa perkuliahan. Semoga keberkahan ilmu dan amal selalu mengiringi langkah kehidupan kita semua.

4. Para *Asatidz Tarbiyah* Kota Semarang Pak Agung Budi Margono, Pak Hadi Santoso, Pak Eka Mulyanto, Mas Haryono, Ustadz Subhan, dr. Bagus Anggoro, Mas Anantiyo Widodo. Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan kepercayaan yang kalian berikan selama ini, kelak tarbiyah yang kalian tanamkan akan menjadi investasi kebaikan yang tak pernah ada akhirnya.

5. Keluarga Besar Pengurus Daerah KAMMI Semarang Mas Muhith Harahap, Mbak Aprina Santeka, Mas Arif Fajar Hidayat, Mas Arief Eka Atmaja, Mas Ali Umar Dhani, atas pengalaman dan ilmunya, serta pengurus periode 2010-2012 Sekjend Yuniar Kustanto, Ahmad Hanafi, Muhamad Perdana, BPH KAMMI Semarang Mbak Aty, Mbak Icha, Mbak Uhtin, Mbak Etika, Mbak Diana, Mbak Puput, Barri Pratama, Dwi Purnawan, Ibnu Dwi Cahyo, Mbak Afsi, Mbak Danik, Mbak

Fatimah, Cecep Setiawan dan jajaran staf yang belum bisa disebutkan satu persatu.

6. Seluruh kader dan pengurus komisariat KAMMI Semarang, di Undip, Unnes, IKIP PGRI, IAIN Walisongo, Unissula. Terima kasih atas kesempatan belajar dan beramal yang telah diberikan selama ini. Mohon maaf jika banyak sikap dan sikap yang kurang menyenangkan.
7. Seluruh teman-teman dan adik-adik mentoring/*halaqoh tarbawiy*. Terima kasih atas kehangatan dan kepeduliannya selama ini. Mohon maaf jika banyak terdapat salah kata dan perbuatan. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama dapat bermanfaat bagi pribadi dan masyarakat sekitar.
8. Keluarga besar ROHIS/Mizan FE UNDIP dan KAMMI Komisariat Ekonomi : Mas Dudi, Mas Sigit, Mbak Erly, Mbak Tuti, Mbak Siti, Mbak Retno, Mbak Raeni, Mas Supriyadi, Mas Apung, Mas Wahyu, Mas Kunari, Hani, Ayu, Eri, Ika, Thyas, Dewi, Satria, Agung, Angga, Rizka, Asnia, Ikun, dan seluruh saudara-saudara lainnya yang banyak mengingatkan dalam hal kebenaran dan kesabaran.
9. Para penghuni Wisma Al-Fatih Genuk, Wisma Al-Hamra Singosari, dan Wisma All New Hamra Pleburan. Terima kasih telah menjadi keluarga kecil bahagia selama kuliah. Mohon maaf jika belum bisa banyak memberikan hal yang berarti bagi kalian semua.
10. Keluarga besar Annida Islamic Center Wonodri : Pak Kis, Bu Kis, Tika, Ilham, Haidar, Shandy, Indra, Rojab, Wawan, Ahmad, Dapi,

Bang Jo, Bang Padri, Rizal, Bu Nuning, Gigih, Ratih, Adit, Diaz, Fajar, Leo, Aji, Kak Windi, Findi, Bagus, dan seluruh warga 'dinasti' Annida Islamic Center Wonodri. Terima kasih telah memahamkan penulis akan makna dari Ketabahan, Syukur Nikmat, dan Kebesaran Jiwa dalam menghadapi kehidupan ini. Mohon maaf atas segala kesalahan.

Akhir kata, segala kebenaran hanya milik Allah Sang *Rabbul Izzati dan* kesalahan yang terjadi dalam penulisan skripsi ini merupakan sepenuhnya tanggung jawab Penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Agustus 2012

Penulis

Galih Pramilu Bakti

NIM. C2B005172

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	12
1.3.1 Tujuan Penelitian	12
1.3.2 Kegunaan Penelitian	13
1.3.2.1 Kegunaan Akademis	13
1.3.2.2 Kegunaan Praktis	13
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II TELAAH PUSTAKA	
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	16
2.1.1 Desentralisasi Fiskal	16
2.1.2 Teori Pengeluaran Pemerintah.....	22
2.1.3 Gender.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu.....	31
2.3 Kerangka Pemikiran	40
2.4 Hipotesis	41

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	43
3.1.1 Angka Partisipasi Sekolah.....	44
3.1.2 Angka Melek Huruf Perempuan.....	44
3.1.3 Desentralisasi Fiskal	44
3.1.4 Populasi Penduduk.....	46
3.1.5 PDRB Per Kapita.....	46
3.1.6 Jumlah SMA/MA.....	46
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	47
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	48
3.4 Metode Analisis.....	48
3.4.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	50
3.4.2 Pengujian Hipotesis	53
3.4.2.1 Panel Least Square.....	53
3.4.2.2 Fixed Effect Methods.....	54
3.4.2.3 Random Effect Methods	54
3.4.3 Analisis Regresi.....	54
3.4.4 Uji Hausman.....	57

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian	59
4.1.1 Letak Geografis dan Pemerintahan.....	59
4.1.2 Kependudukan dan Akses Pendidikan.....	60
4.1.2.1 Penduduk.....	60
4.1.2.2 Akses Pendidikan.....	62
4.2 Analisis Data	64
4.2.1 Estimasi Model.....	65
4.2.2 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik.....	67
4.2.3 Uji Hausman.....	72
4.3 Uji Hipotesis.....	72
4.4 Hasil dan Pembahasan	82

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	85
5.2 Keterbatasan.....	87
5.3 Saran	88

DAFTAR PUSTAKA.....	89
---------------------	----

LAMPIRAN.....	91
---------------	----

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Indeks Pembangunan Gender Provinsi DIY 2004-2009 12
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu 31
Tabel 4.1	Prosentase Perempuan Pekerja Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2004-2008..... 63
Tabel 4.2	Uji Jarque Bera Persamaan Fixed Effect Methods 69
Tabel 4.3	Uji Durbin Watson Persamaan Fixed Effect Methods..... 70
Tabel 4.4	Korelasi Antar Variabel Pada FEM 71
Tabel 4.5	Korelasi Antar Variabel Pada FEM 71
Tabel 4.6	Korelasi Antar Variabel Pada FEM 72
Tabel 4.7	Korelasi Antar Variabel Pada FEM 72
Tabel 4.8	Uji White Heteroskedasticity..... 73
Tabel 4.9	Uji Hausman Model Fixed Effect dengan Random Effect..... 74
Tabel 4.10	Hasil Olah Data Pada Sisi Pendapatan Model FEM Angka Melek Huruf Perempuan 76
Tabel 4.11	Hasil Olah Data Pada Sisi Pengeluaran Model FEM Angka Melek Huruf Perempuan 78
Tabel 4.12	Hasil Olah Data Pada Sisi Pendapatan Model FEM Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA 80
Tabel 4.13	Hasil Olah Data Pada Sisi Pengeluaran Model FEM Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA 83

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2004-2009	3
Gambar 1.2 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY tahun 2004-2009.....	4
Gambar 1.3 Angka Partisipasi Murni Perempuan Kabupaten Kota Provinsi DIY Tahun 2004-2006.....	9
Gambar 1.4 Angka Melek Huruf Laki-laki dan Perempuan Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2004-2009	10
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	40
Gambar 4.1 Jumlah Penduduk Provinsi DIY berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2004-2009.....	62
Gambar 4.2 Angka Melek Huruf Perempuan Usia 15-24 Tahun di Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2004-2009.....	65

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pendapatan Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan	92
Lampiran 2 Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pengeluaran Terhadap Angka Melek Huruf Perempuan	93
Lampiran 3 Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pendapatan Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA	94
Lampiran 4 Hasil Estimasi Desentralisasi Fiskal dari Sisi Pengeluaran Terhadap Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA.....	95
Lampiran 5 Data Variabel Angka Melek Huruf Perempuan Dengan Rasio Pendapatan.....	96
Lampiran 6 Data Variabel Angka Melek Huruf Perempuan Dengan Rasio Pengeluaran	97
Lampiran 7 Data Variabel Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA Dengan Rasio Pendapatan.....	98
Lampiran 8 Data Variabel Angka Partisipasi Sekolah Perempuan SMA Dengan Rasio Pengeluaran	99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Beberapa dekade terakhir desentralisasi fiskal diterapkan di berbagai belahan dunia. Sebagai contoh, desentralisasi pengambilan kebijakan fiskal dan administrasi publik di negara-negara Amerika Latin, dan reformasi ekonomi dari sentralistik menjadi desentralisasi di negara-negara Asia. Bird dan Vaillancourt dalam Kwon (2003) mengemukakan beberapa argumen mengapa desentralisasi fiskal banyak diadopsi oleh negara-negara di dunia karena desentralisasi fiskal diyakini mampu meningkatkan kinerja sektor publik. Oates (1999) dalam teori *Fiscal Federalism* menyatakan bahwa penentuan barang publik dengan desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas alokasi sumber daya. Alasannya adalah: 1) pemerintah daerah dapat menyesuaikan letak geografis yang tepat bagi barang publik di daerah 2) pemerintah daerah mempunyai posisi yang lebih baik dalam mengenal pilihan dan kebutuhan daerah 3) tekanan dari persaingan antar wilayah akan memotivasi pemerintah daerah untuk inovatif dan akuntabel kepada penduduknya.

Sejak Januari 2001, Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan sejalan dengan dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Kedua peraturan tersebut kemudian disempurnakan oleh

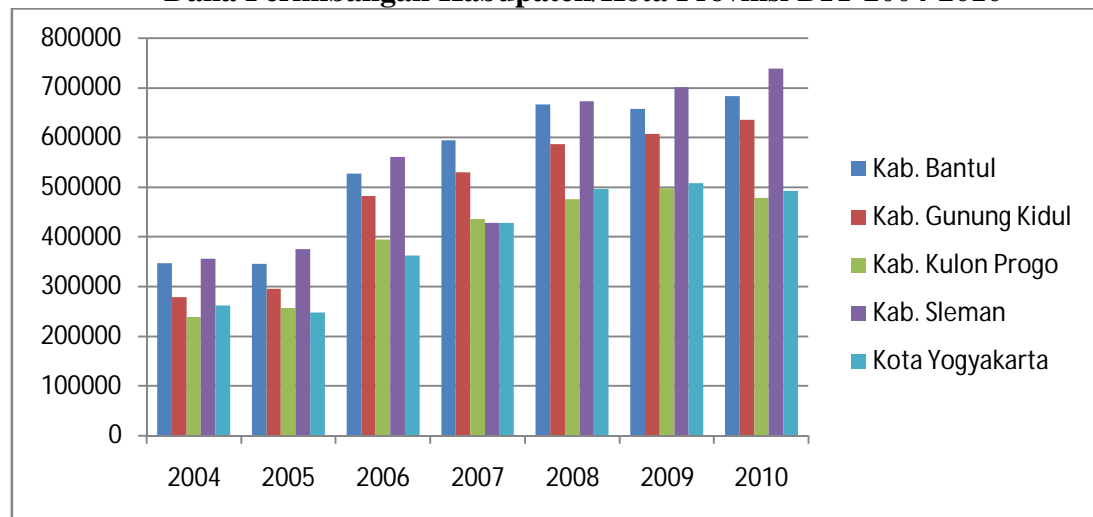
UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Undang-undang tersebut memiliki dampak bahwa pemerintah kabupaten maupun kota mempunyai andil besar dalam mengatur perekonomian daerahnya sendiri. Dengan demikian kondisi perekonomian tiap-tiap daerah akan sangat beragam dan tergantung pada potensi ekonomi masing-masing daerah beserta cara pengelolaannya. Hal ini juga berimplikasi pada kebijakan-kebijakan di tiap daerah dalam hal ini adalah kebijakan fiskal di tiap-tiap daerah, hal ini dikarenakan pemberlakuan desentralisasi fiskal sesuai dengan konsep otonomi daerah.

Implikasi dari kewenangan atau fungsi yang diserahkan ke daerah adalah kebutuhan dana yang cukup besar (Sidik, 2002). Daerah tidak mungkin diberi kepercayaan mengelola urusan yang selama ini ditangani oleh pemerintah pusat tanpa didukung pendanaan yang memadai. Untuk itu perlu diatur suatu mekanisme yang mengatur perimbangan keuangan antara pusat dan daerah untuk membiayai kewenangan atau fungsi yang diserahkan ke daerah. Melalui mekanisme ini, pemerintah pusat tetap akan memberikan dana transfer berupa bagi hasil pajak, bagi hasil non pajak (sumber daya alam), DAU dan DAK. Sehingga transfer dana ini akan menghilangkan kekhawatiran daerah dalam membiayai kegiatan operasionalnya sehari-hari.

Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya dan bahkan sudah menjadi ciri dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan utama implementasi transfer adalah untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang

muncul lintas daerah, perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidakefisienan fiskal, dan pemerataan fiskal antardaerah (Oates, 1999).

Gambar 1.1
Dana Perimbangan Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2004-2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (data diolah)

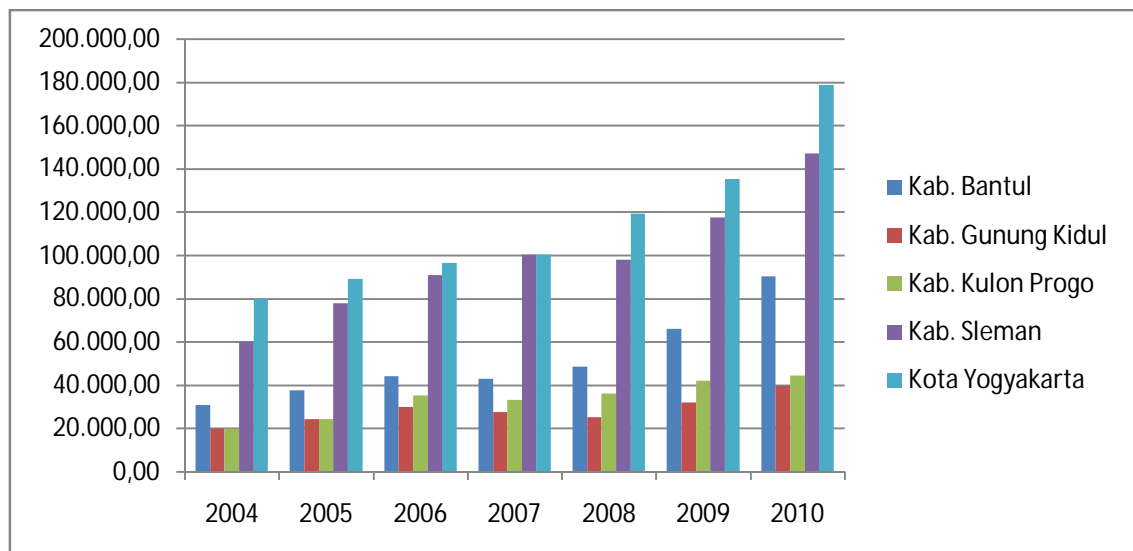
Dana perimbangan yang diperoleh kabupaten/kota di Provinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan kenaikan. Daerah yang menerima dana perimbangan terbesar tiap tahunnya adalah Kabupaten Sleman dan yang paling rendah adalah Kabupaten Kulonprogo.

Kebutuhan daerah tidak hanya menyangkut kegiatan operasional semata-mata, maka daerah juga perlu memikirkan cara untuk menambah pendapatannya sendiri. Berdasarkan amanat UU No. 33 tahun 2004, penerimaan daerah selain dana perimbangan dari pusat dapat berasal dari PAD dan lain-lain pendapatan yang sah. Dalam hal ini, tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah adalah melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap pendapatan asli

daerahnya. Jadi, pelaksanaan desentralisasi fiskal juga mendorong daerah untuk lebih giat lagi dalam menggali sumber-sumber PAD.

Sebagai cerminan diimplementasikannya desentralisasi fiskal, maka kabupaten/kota di Provinsi DIY pun berusaha untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah masing-masing. Berikut grafik perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi DIY

Gambar 1.2
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Provinsi DIY 2004-2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah (data di olah)

Berdasarkan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten/kota di Provinsi DIY menunjukkan kenaikan pada setiap tahunnya. PAD terbesar dimiliki oleh Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Dari grafik di atas menunjukkan perbedaan yang sangat mencolok antara PAD Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta jauh lebih besar dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di provinsi DIY. Kabupaten Gunung Kidul dan Kabupaten Kulonprogo menjadi dua daerah yang mendapatkan dana perimbangan terendah di Provinsi DIY.

Konsekuensi lain yang diharapkan dari desentralisasi fiskal adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat (Purwantoro, 2007). Sebelum pemberlakuan otonomi daerah, semua jenis pelayanan yang diberikan kepada masyarakat baik tentang teknis operasi dan pendanaannya kebanyakan diatur oleh pemerintah pusat. Dengan adanya desentralisasi ini, pemerintah daerah diberi keleluasan untuk menyelenggarakan sendiri tata pemerintahannya. Setelah desentralisasi, masyarakat menuntut agar pelayanan kepada masyarakat tidak berkurang bahkan harus lebih baik daripada sebelumnya.

Desentralisasi dan hak perempuan mempunyai hubungan yang positif. Keduanya dibutuhkan untuk memperluas proses demokratisasi dimana perempuan terorganisir dalam *civil society* dan secara politik tergambar pada semua tingkat pemerintahan (Beall, 2007). Akses pada sumber daya dan pelayanan untuk pembangunan adalah beberapa cara untuk menilai dampak dari desentralisasi fiskal. Apakah penekanannya pada meningkatkan masyarakat yang demokratis atau membuat penyediaan layanan lebih responsif dan efisien, pengujian terbesarnya adalah apakah kualitas hidup orang-orang miskin meningkat sebagai hasil dari akses layanan yang lebih besar dan peningkatan akses untuk dan mengendalikan sumber daya untuk pembangunan. Untuk perempuan yang secara terus menerus menduduki posisi subordinat dalam lingkungan privat dan publik, permasalahan akses adalah penting (Macleane, 2003).

Desentralisasi diharapkan membuat *outcome* pembangunan lebih positif. Pada kebanyakan negara berkembang, desentralisasi berproses secara relatif dalam tahap yang mulai timbul. Bukti bagaimana perempuan terdampak oleh

kebijakan desentralisasi mengindikasikan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan yang signifikan di tingkat daerah. Pada tingkat daerah, kebanyakan layanan yang disediakan adalah *quasi public goods* –barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan dan dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah (Guritno; 2001). Pada kondisi tersebut, penting untuk mengalokasikan sumber daya secara hati-hati untuk memastikan akses layanan publik pada *disadvantages group* yang dimana perempuan termasuk di dalamnya. Bagaimanapun juga, sejak dimungkinkannya identifikasi keuntungan layanan publik pada kebanyakan kasus. Kepekaan gender penting untuk memastikan alokasi sumberdaya yang adil.

Dari beberapa penelitian dapat dilihat bahwa tren global desentralisasi sumber daya dan tanggung jawab ke daerah berdampak positif untuk perempuan. Logika yang digunakan adalah hubungan gender di kebanyakan bagian dunia masih melihat perempuan sebagai pihak yang bertanggungjawab pada urusan rumah tangga. Desentralisasi bisa menjadi sarana untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dan meningkatkan hak-hak perempuan. Salah satu tujuan pembangunan manusia di Indonesia adalah mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya pembangunan manusia, tanpa membedakan laki-laki atau perempuan.

Berdasarkan data dalam MDG's Report tahun 2007 menyatakan, meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (*gender gap*) masih terjadi di sebagian besar bidang. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan kualitas kehidupan

dan peran perempuan agar mereka tidak tertinggal dibandingkan laki-laki. Seperti yang sebelumnya diasumsikan bahwa desentralisasi menyediakan kesempatan yang besar pada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, dapat juga diasumsikan bahwa wilayah lokal pemerintahan juga sesuai untuk partisipasi perempuan. (Mukhopadhyay; 2005)

Secara teoritis, desentralisasi fiskal dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi efisiensi dan kesetaraan dalam sudut pandang gender. Dampak dari desentralisasi fiskal tergantung terhadap desain mekanisme institusi, yang dimana hubungan antara tingkat desentralisasi dan bagaimana kebijakan desentralisasi dalam aturan transfer keuangan pemerintah pusat, mengikuti dengan fungsi dan kesepakatan finansial pada tingkat daerah dan hubungan institusi. Prinsip dari subsidi negara bahwa desentralisasi fiskal baik untuk efisiensi dan kesetaraan dalam ekonomi pada pendekatan dan rasionalisasi bahwa pemerintah daerah yang lebih dekat kepada penduduk lebih efisien dalam menentukan layanan publik daripada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Pemikiran ini dipegang dalam pembangunan gender, dimana pemerintah daerah mempunyai informasi yang lebih baik dalam preferensi dan kebutuhan gender. (Chakraborty; 2010)

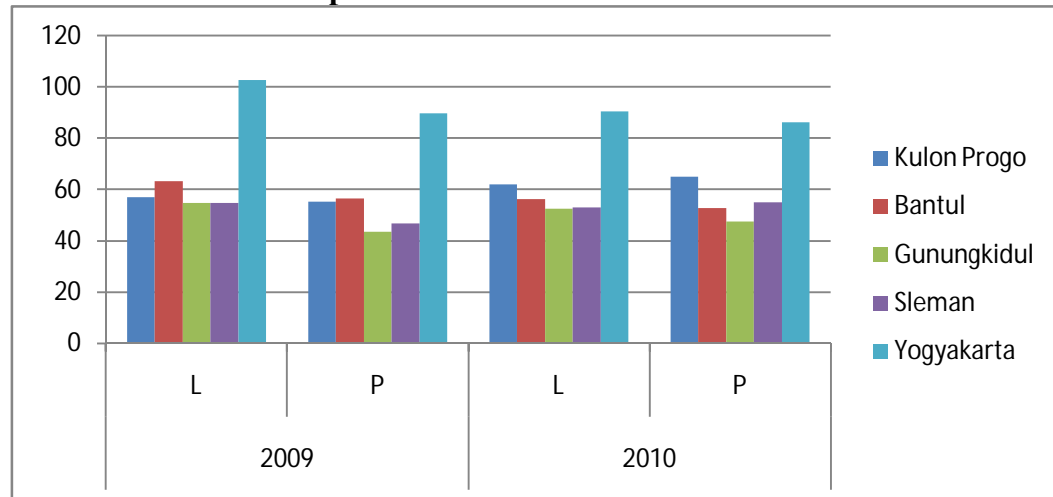
Upaya peningkatan peranan perempuan dan kesetaraan gender hanya dapat dicapai jika perempuan dan laki-laki memiliki akses yang baik pada pendidikan dan sumber informasi lain. Dengan tingkat pendidikan yang baik, orang memiliki tingkat wawasan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih baik, sehingga lebih mampu melihat dan memanfaatkan peluang yang ada untuk

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya. Melalui pendidikan, perempuan dan laki-laki akan memiliki jalan untuk ikut serta dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Kesempatan memperoleh pendidikan yang setara adalah hak asasi yang melekat pada perempuan sebagai warga negara agar dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, kecakapan dan keahlian, sehingga dapat memberikan kontribusi yang sama untuk memacu pembangunan.

Indonesia sendiri memulai perhatian dan komitmennya terhadap kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan semenjak dikeluarkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Hasil monitoring UNDP terhadap pencapaian MDGs pada program mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan pada tahun 2007 menunjukkan beberapa hasil. Di bidang pendidikan, kemajuan yang terjadi dalam kesetaraan gender secara keseluruhan cukup berarti.

APM merupakan salah satu tolok ukur yang digunakan MDGs dalam mengukur pencapaian kesetaraan gender dibidang pendidikan. APM mengukur proporsi anak yang bersekolah tepat waktu, yang dibagi dalam tiga kelompok jenjang pendidikan yaitu SD untuk penduduk usia 7-12 tahun, SMP untuk penduduk usia 13-15 tahun, dan SMA untuk penduduk usia 16-18 tahun. Secara umum capaian APM di provinsi D.I Yogyakarta perempuan masih memiliki nilai APM dibawah laki-laki dengan selisih yang tidak signifikan.

Gambar 1.3
Angka Partisipasi Murni Laki-laki dan Perempuan Tingkat SM
Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2009-2010

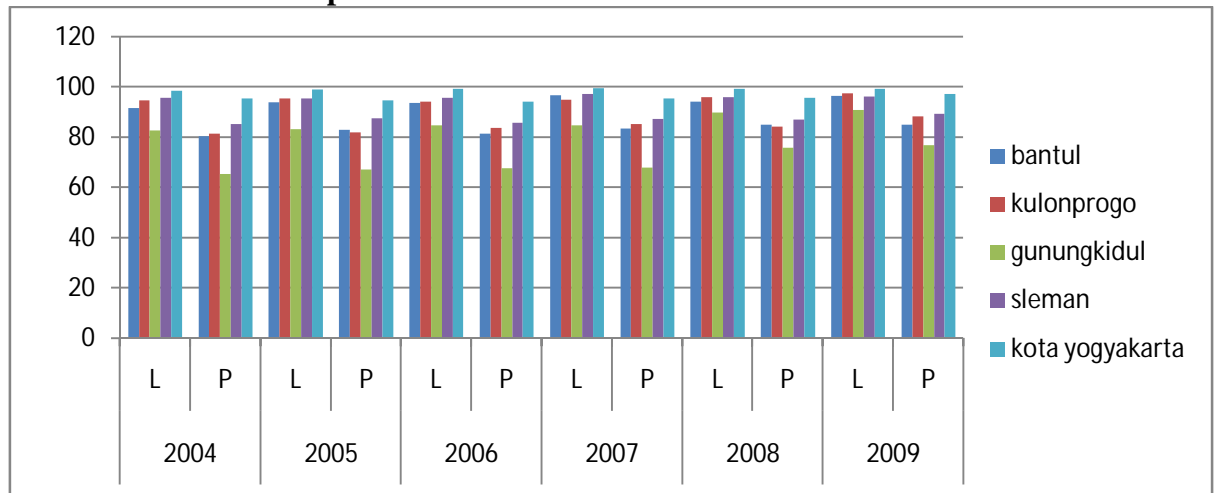


Sumber: BPPM DIY (data diolah)

Beerdasarkan grafik di atas, gambaran secara umum jumlah siswa pada tingkat pendidikan lanjutan atas terlihat siswa perempuan yang sekolah lebih rendah daripada laki-laki. Jika dilihat perbandingan antara laki-laki dengan perempuan secara umum dapat dinyatakan APM lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan, hal ini menunjukkan masih terjadinya bias gender untuk meraih pendidikan.

Salah satu indikator pencapaian kesetaraan gender menurut MDGs adalah angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun. Kelompok penduduk usia sekolah ini adalah kelompok penduduk usia produktif, sebagai sumber daya pembangunan yang seharusnya memiliki pendidikan yang memadai dan keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh karena itu, dianggap penting untuk melihat perkembangan kemajuan indikator ini.

Gambar 1.4
Angka Melek Huruf Laki-laki dan Perempuan
Kabupaten/Kota Provinsi DIY Tahun 2004-2009



Sumber : BPS Provinsi DIY (data di olah)

Perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun dari 2004-2009 di kabupaten/kota provinsi DIY cenderung fluktuatif setiap tahunnya dan tidak menunjukkan perubahan yang mencolok. Daerah yang mempunyai angka melek huruf paling tinggi adalah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, sedangkan Kabupaten Gunungkidul adalah daerah yang memiliki angka melek huruf paling rendah di antara kabupaten/kota yang lain di provinsi DIY.

Secara umum di Provinsi DIY Angka Melek Huruf cukup tinggi, pada tahun 2004 untuk 100 orang laki-laki yang ada di Provinsi DIY mampu membaca dan menulis sebanyak 91,9 persen, sebaliknya untuk perempuan setiap 100 orang yang mampu membaca dan menulis sebanyak 79,9 persen. Demikian pula kondisi ini meningkat dengan diberlakukannya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM masyarakat dengan adanya program BOS, PAUD maupun kejar paket A,B, C, sehingga secara formal maupun non formal masyarakat mampu

mengikuti pendidikan. Sampai akhir tahun 2008 AMH laki-laki meningkat menjadi 94,46 persen dan perempuan 84.64 persen.

Walaupun secara umum AMH di kota/kabupaten dinyatakan baik, akan tetapi nampak bahwa Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman memiliki kemungkinan bagi setiap perempuan untuk menikmati fasilitas pendidikan yang disiapkan oleh pemerintah jauh lebih baik dan berkualitas. Berdasarkan data Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat (BPPM) Provinsi DIY pada tahun 2010, pencapaian pembangunan gender yang diukur dengan IPG selama kurun waktu 2006-2007 mengalami peningkatan, untuk Kota Yogyakarta tetap pada urutan ke 1 IPG tertinggi Kabupaten/Kota di Indonesia, sedangkan Kabupaten Sleman pada peringkat 9. Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul tergolong IPG menengah bawah. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan gender secara lintas daerah di Provinsi DIY.

Pembangunan yang telah dilaksanakan selama ini telah menunjukkan kemajuan di berbagai bidang, namun dirasakan masih mengandung kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, pandangan tentang perbedaan dalam kesempatan dan perlakuan yang ditekankan atas dasar diskriminasi gender yang mengakibatkan kerugian bagi perempuan dalam kedudukan maupun perannya sebagai mitra sejajar laki-laki.

1.2. Rumusan Masalah

Pada dasarnya penelitian ini dilandasi dengan kerangka berpikir bahwa tujuan dari penerapan desentralisasi fiskal adalah meningkatkan layanan publik masyarakat di daerah. Dalam penelitian ini secara spesifik pelayanan publik yang dimaksud adalah akses pendidikan pada perempuan. Dari uraian pada latar belakang masalah di atas diketahui masih ada ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam sektor pendidikan. Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?
2. Bagaimana pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Partisipasi Sekolah Perempuan pada tingkat SMA di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Melek Huruf Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap Angka Partisipasi Sekolah Perempuan pada tingkat SMA di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

1.3.2. Kegunaan Penelitian

1.3.2.1. Kegunaan Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan sebagai :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk melihat pengaruh desentralisasi fiskal terhadap *outcome* bidang pendidikan yang secara spesifik berupaya untuk meningkatkan kualitas dan akses pendidikan kepada perempuan
2. Tambahan informasi bagi pembaca pada umumnya dan bagi mahasiswa pada khususnya
3. Bukti empiris pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan pada tingkat SMA di Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.3.2.2. Kegunaan Praktis

Dalam kaitannya dengan pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan sebagai:

1. Masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan alokasi APBD serta kesetaraan dan pemberdayaan perempuan.
2. Masukan sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah akses pendidikan secara umum dan khususnya kepada kaum perempuan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bermaksud untuk memudahkan para pembaca dalam memahami isi penelitian. Penelitian ini disusun dalam lima bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang menjelaskan tentang perlunya analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA di kabupaten/kota Provinsi DIY. Latar belakang ini akan menjadi dasar bagi perumusan masalah untuk menganalisis dampak desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran dan pendapatan terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan SMA/MA. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu menjadi masukan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang terkait dengan APBD serta kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Serta memberikan masukan sebagai solusi atas permasalahan yang terkait dengan masalah akses pendidikan secara umum dan khususnya kepada kaum perempuan.

Bab kedua merupakan telaah pustaka yang mendukung penelitian. Bab ini berisi landasan-landasan teori yang menjadi dasar dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu teori-teori yang relevan sehingga mendukung tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi fiskal yang di dalamnya mencakup pendekatan dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal, desentralisasi fiskal di Indonesia, teori pengeluaran pemerintah dan pengertian dasar tentang gender. Pada bab dua ini juga adanya penelitian terdahulu yang merupakan penelitian yang menjadi dasar pengembangan bagi penulisan penelitian ini, sehingga dapat disusun kerangka penelitian dan hipotesis.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi terkait. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan data panel yang dianalisis dengan model *Fixed Effect Methods*.

Bab keempat menguraikan deskripsi objek penelitian yaitu wilayah Provinsi DIY dilihat dari sisi geografis, pemerintahan, kependudukan, dan akses pendidikan di Provinsi DIY pada periode 2004-2009. Bab ini juga memuat hasil dan pembahasan analisis data yang menjelaskan hasil estimasi dari penelitian yang dilakukan. Bagian pembahasan menjelaskan interpretasi dan pembahasan hasil penelitian secara komprehensif.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari hasil analisis data dan pembahasan. Dalam bab ini juga berisi saran-saran yang direkomendasikan kepada pihak-pihak tertentu yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

Dalam menganalisis dampak desentralisasi fiskal terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan pada tingkat SMA Kabupaten/Kota di Provinsi DIY, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah. Dasar teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori desentralisasi fiskal, teori pengeluaran pemerintah dan teori tentang gender.

Selain itu, agar secara empiris dapat dibandingkan dengan hasil-hasil penelitian sejenis atau yang memiliki tema hampir sama, maka dilengkapi juga dengan beberapa penelitian terdahulu tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap akses pendidikan dan penyediaan barang publik. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sekaligus menjadi acuan dan menjadi komparasi dalam penelitian ini.

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Dengan desentralisasi akan diwujudkan dalam pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk

memungut pajak (taxing power), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002).

Wallace Oates dalam *Decentralization Theorem*-nya menyatakan bahwa barang publik yang ditentukan pada wilayah dan populasi tertentu, dan dengan biaya yang sama pada setiap tingkat output barang selalu lebih efisien disediakan oleh pemerintah lokal/daerah daripada disediakan oleh pemerintah pusat. Adanya penerapan tata pemerintahan desentralisasi mempunyai dampak ekonomi pada suatu negara. Dalam hal ini, didukung oleh dua perspektif teori yaitu *traditional theories (First-Generation Theories)* dan *new perspective theories (Second Generation Theories)*. Pada *traditional theories* menekankan dua keuntungan utama dari desentralisasi yaitu penggunaan informasi yang lebih efisien karena pemerintahan daerah yang lebih dekat dengan masyarakat, memungkinkan masyarakat dalam memilih barang dan jasa publik sesuai dengan selera dan keinginan masyarakat. Sedangkan untuk *new perspective theories* menjelaskan pengaruh desentralisasi terhadap perilaku pemerintah daerah yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Secara umum desentralisasi terdiri atas desentralisasi politik (political decentralization), desentralisasi administratif (administrative decentralization), desentralisasi fiskal (fiscal decentralization), desentralisasi ekonomi (economic or market decentralization). Desentralisasi fiskal terdiri dari 2 kata, yaitu desentralisasi dan fiskal. Desentralisasi mengacu pada “pembalikan konsentrasi

administrasi pada pemerintah pusat dan penyerahan kekuasaan ke pemerintah lokal” (Smith 1985 : 1) atau sebagai “proses penyerahan kekuasaan politik, fiskal dan administratif kepada unit pemerintah subnasional” (Burki et al 1993 : 3).

Pemindahan proses pengambilan keputusan ke tingkat pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat merupakan dasar dari desentralisasi. Oleh karena itu, desentralisasi dapat dikatakan sebagai sebuah alat untuk mencapai salah satu tujuan negara yaitu memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis.

Desentralisasi fiskal, merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk surcharge of taxes, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat (Sidik, 2002). Pelaksanaan desentralisasi fiskal akan berjalan dengan baik dengan mempedomani hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan enforcement;
2. Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam melakukan pungutan pajak dan retribusi Daerah.

Khusus desentralisasi fiskal, Bird dan Vaillancourt (2000) menyebutkan tiga variasi desentralisasi dalam kaitannya dengan derajat kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan daerah. Pertama, desentralisasi berarti pelepasan

tanggung jawab yang berada dalam lingkungan pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah. Kedua, delegasi yang berhubungan dengan suatu situasi, yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah. Ketiga, pelimpahan (*devolusi*) yang berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja bersifat implementatif tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu dikerjakan berada di daerah.

Litvack and Seddon (1998) di dalam Mauludin (2008) menyebutkan tiga pendekatan sebagai dasar di dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu (i) pendekatan penerimaan, (ii) pendekatan pengeluaran, (iii) pendekatan komprehensif. Pendekatan penerimaan (*income approach*) mempunyai arti bahwa daerah diberi kewenangan untuk memungut pajak atau menyerahkan proporsi tertentu dari penerimaan pusat. Di samping itu terkadang dimodifikasi dengan tambahan transfer dana yang bersifat umum dan khusus untuk mengkompensasi perbedaan di dalam potensi penerimaan. Sisi penting yang perlu diperhatikan dalam desentralisasi fiskal tidak hanya pada sisi penerimaan saja, tetapi juga perlu dilihat dari sisi pengeluaran (*expenditure approach*).

Pendekatan pengeluaran diartikan bahwa daerah diberi kewenangan untuk menetapkan pengeluarannya, selanjutnya akan dibiayai sebagian atau seluruhnya melalui transfer. Transfer tersebut dapat berupa pinjaman, hibah (*grant*), atau bagi hasil (*revenue sharing*). Dan terakhir pendekatan pengeluaran ini tidak terlepas dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah yang baik akan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan dana-dana yang ada.

Dengan demikian daerah perlu menyusun rencana pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah, dan dilaksanakan dengan lebih transparan dan akuntabel.

Pendekatan komprehensif dilakukan dengan cara menyelaraskan potensi penerimaan dengan besarnya penerimaan dengan besarnya pengeluaran (*expenditure needs*). Dengan pendekatan ini kewenangan di bidang penerimaan dan pengeluaran, dengan asumsi tertentu, diserahkan kepada daerah secara bersamaan. Apabila terjadi ketimpangan antara potensi penerimaan dan besarnya tanggung jawab pengeluaran yang didelegasikan maka pemerintah pusat akan menutupnya dengan hibah atau pinjaman.

2.1.1.1. Desentralisasi Fiskal di Indonesia

Proses pemulihan ekonomi yang cukup lambat merupakan hal yang mengiringi desentralisasi fiskal di Indonesia. Selain harus mengatasi dampak krisis dan menjaga stabilitas ekonomi, pada saat yang bersamaan belanja negara harus memuat skema desentralisasi fiskal sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang kemudian disempurnakan oleh UU No. 33 tahun 2004.

Menurut UU No. 33 tahun 2004, sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka desentralisasi terdiri dari: pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil penerimaan Pajak Bumi

dan Bangunan (PBB), bagi hasil penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), bagi hasil penerimaan sumber daya alam, DAU dan DAK.

Dalam upaya meningkatkan PAD, daerah dilarang untuk, (i) menetapkan peraturan daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan (ii) menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/impor. Ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah harus dilaksanakan sesuai dengan undang-undang.

Transfer pemerintah pusat terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keberadaan DAU saja tidak mencukupi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya, oleh karena itu diperlukannya Dana Alokasi Khusus (DAK). Pada hakikatnya DAK memiliki pengertian dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK ditentukan dengan memperhatikan ketersediaanya dana dalam APBN.

Sesuai dengan UU No. 33 tahun 2004, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah : (1) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan daerah lain, misalnya, kebutuhan dikawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi / prasarana baru, pembangunan jalan yang terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer, (2) kebutuhan yang merupakan komitmen atau prioritas nasional.

Selain Pendapatan Asli Daerah dan Dana perimbangan, terdapat juga lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sesuai pasal 28 PEMENDAGRI No.13 Tahun

2006, untuk kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup :

1. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanganan korban/kerusakan akibat bencana alam;
2. Dana bagi hasil pajak dari propinsi kepada kabupaten/kota;
3. Dana penyesuaian dan dana alokasi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
4. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

2.1.2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah (*goverment expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output, maupun kesempatan kerja dan memacu atau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menurut pendapat Keynes dalam Sadono Sukirno (2000) bahwa peranan atau campur tangan pemerintah masih sangat diperlukan yaitu apabila perekonomian sepenuhnya diatur oleh kegiatan di pasar bebas, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kesempatan kerja penuh tetapi juga

kestabilan kegiatan ekonomi tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi fluktuasi kegiatan ekonomi yang lebar dari satu periode ke periode lainnya dan ini akan menimbulkan implikasi yang serius kepada kesempatan kerja dan pengangguran dan tingkat harga.

Menurut Guritno (1999), Pengeluaran Pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu teori makro dan teori mikro. Dalam penelitian ini mengedepankan teori dari sisi makro. Teori makro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi dan dapat digolongkan ke dalam tiga golongan, yaitu model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah, hukum Wagner mengenai perkembangan aktivitas pemerintah, teori Peacock dan Wiseman.

Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentasi investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan pemerintah tetap besar dalam tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang banyak dan kualitas yang lebih baik. Selain itu, pada tahap ini perkembangan ekonomi menyebabkan terjadinya hubungan antar sektor semakin rumit. Misalnya pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh perkembangan sektor industri, menimbulkan semakin tingginya tingkat pencemaran udara dan air, dan pemerintah harus turun tangan untuk mengatur dan mengurangi akibat negatif dari polusi itu terhadap masyarakat. Pemerintah juga harus melindungi buruh yang berada dalam posisi yang lemah agar dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Musgrave berpendapat bahwa dalam suatu proses pembangunan, investasi swasta dalam persentase terhadap GDP semakin besar dan persentase investasi pemerintah dalam persentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Teori perkembangan peranan pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow adalah suatu pandangan yang ditimbulkan dari pengamatan berdasarkan pembangunan

ekonomi yang dialami oleh banyak negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu. Selain itu, tidak jelas apakah tahap pertumbuhan ekonomi terjadi tahap demi tahap, ataukah beberapa tahap dapat terjadi secara simultan.

Wagner mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dalam persentasi terhadap GNP yang juga didasarkan pula pada pengamatan di negara-negara Eropa, Amerika Serikat dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya dalam bentuk suatu hukum, akan tetapi dalam pandangannya tersebut dijelaskan apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pengeluaran pemerintah dan GNP, apakah dalam pengertian pertumbuhan secara relatif ataukah secara absolut. Apabila yang dimaksud Wagner adalah perkembangan pengeluaran pemerintah secara relatif sebagaimana teori Musgrave, maka hukum Wagner adalah sebagai berikut : Dalam suatu perekonomian, apabila pendapatan perkapita meningkat, secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat. Dasar dari hukum tersebut adalah pengamatan empiris dari negara-negara maju (Amerika Serikat, Jerman dan Jepang), tetapi hukum tersebut memberi dasar akan timbulnya kegagalan pasar dan eksternalitas.

Wagner menyadari bahwa dengan bertumbuhnya perekonomian hubungan antara industri dengan industri, hubungan industri dengan masyarakat, dan sebagainya menjadi semakin rumit atau kompleks. Dalam hal ini Wagner menerangkan mengapa peranan pemerintah menjadi semakin besar, yang terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Kelemahan hukum Wagner adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. Wagner mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut teori organis mengenai pemerintah yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat yang lainnya.

Peacock dan Wiseman adalah dua orang yang mengemukakan teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik. Teori mereka didasarkan pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman merupakan dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat kesediaan ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

2.1.3. Gender

Istilah gender dikemukakan oleh para ilmuwan sosial dengan maksud untuk menjelaskan perbedaan perempuan dan laki-laki yang mempunyai sifat bawaan (ciptaan Tuhan) dan bentukan budaya (konstruksi sosial. Seringkali orang

mencampuradukkan ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dengan yang bersifat non-kodrati. Perbedaan gender ini juga menjadikan orang berpikir kembali tentang pembagian peran yang dianggap telag melekat, baik pada perempuan maupun laki-laki.

Tabel 2.1
Perbedaan Gender dan Seks/Jenis Kelamin

Gender	Seks/Jenis Kelamin
<ul style="list-style-type: none"> • Bisa berubah • Dapat dipertukarkan • Tergantung musim • Tergantung budaya masing-masing • Bukan kodrat (buatan masyarakat) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak bisa berubah • Tidak dapat dipertukarkan • Berlaku sepanjang masa • Berlaku di mana saja • Kodrat (ciptaan Tuhan): perempuan menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui

Gender adalah identifikasi untuk laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi oleh budaya, termasuk di dalamnya peran dan kewajiban untuk laki-laki dan perempuan, hubungan sosial antara laki-laki dan perempuan, undang-undang, kebijakan, program dan lainnya sering memperkuat konstruksi budaya ini. Peran gender adalah berkaitan dengan tugas, kegiatan pekerjaan yang dianggap sesuai dengan masing-masing jenis kelamin dalam masyarakat. (Rahardjo, 2001).

Di dalam kehidupan bermasyarakat, terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak dari segi biologi semata melainkan juga dari segi perilaku, jenis

pekerjaan, sifat-sifat yang umum dilakukan oleh laki-laki dan perempuan serta dari selera model dan berbagai tradisi seperti kebiasaan, adat atau hal-hal yang sudah berakar di dalam kehidupan sosial dan budaya suatu masyarakat. Jadi pembedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan di dalam kehidupan masyarakat terjadi secara bersamaan yaitu pembedaan menurut peran di dalam konteks sosial budaya yang dihidupkan masyarakat. Pembagian yang secara biologis disebut perbedaan jenis kelamin, sedangkan pembedaan menurut sosial budaya masyarakat disebut gender. (Hatmadji, 2002).

Masalah Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) bukan saja menjadi perhatian kaum perempuan, Edward Wilson (1975) membagi perjuangan kaum perempuan secara sosiologis atas dua kelompok besar, yaitu konsep nurture (konstruksi budaya) dan konsep nature (alamiah).

1. Teori Nurture

Menurut teori nurture, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki pada hakikatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan tersebut menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perjuangan untuk persamaan dipelopori oleh orang-orang yang konsisten memperjuangkan kesetaraan perempuan dan laki-laki (kaum feminis) yang cenderung mengejar “kesamaan” atau fifty-fifty yang kemudian dikenal dengan istilah kesamaan kuantitas (*perfect equality*). Perjuangan tersebut sulit dicapai karena berbagai hambatan, baik dari nilai agama maupun budaya. Karena itu,

aliran nurture melahirkan paham sosial konflik yang memperjuangkan kesamaan proporsional dalam segala aktifitas masyarakat seperti di tingkatan manajer, menteri, militer, DPR, partai politik, dan bidang lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibuatlah program khusus (*affirmatif action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang kadangkala berakibat timbulnya reaksi negatif dari kaum laki-laki karena apriori terhadap perjuangan tersebut.

2. Teori Nature

Menurut teori nature, adanya perbedaan perempuan dan laki-laki adalah kodrat sehingga tidak dapat berubah dan bersifat universal. Perbedaan biologis ini memberikan indikasi dan implikasi bahwa di antara kedua jenis tersebut memiliki peran dan tugas yang berbeda. Manusia, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki perbedaan kodrat sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam kehidupan sosial, ada pembagian tugas (*division of labour*), begitu pula dalam kehidupan keluarga karena tidaklah mungkin sebuah kapal dikomandani oleh dua nakhoda. Talcott Parsons dan Bales (1979) berpendapat bahwa keluarga adalah sebagai unit sosial yang memberikan perbedaan peran suami dan isteri untuk saling melengkapi dan saling membantu satu sama lain. Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara perempuan dan laki-laki, dan hal ini dimulai sejak dini melalui pola pendidikan dan pengasuhan anak dalam keluarga.

Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran, asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan

(komitmen) antara suami-isteri dalam keluarga, atau antara perempuan dan laki-laki dalam kehidupan masyarakat.

Disamping kedua aliran tersebut, terdapat paham kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan keharmonisan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Pandangan ini tidak mempertentangkan antara kaum perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupanberkeluarga, bermasyarakat, dan berbangsa. Karena itu, penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual (yang ada pada tempat dan waktu tertentu) dan situasional (sesuai situasi/keadaan), bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (jumlah/quota) dan tidak bersifat universal.

Inpres No. 9 Tahun 2000 mendefinisikan gender sebagai konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Sedangkan kesetaraan gender didefinisikan sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.

Pengarusutamaan gender adalah suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan pembangunan yang mengintegrasikan pengalaman dan masalah laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan, dan

evaluasi kebijakan serta program politik, sosial, budaya, pertahanan keamanan dan masyarakat. Secara singkat, pengarusutamaan gender merupakan pendekatan yang mengintegrasikan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi kebijakan, program, proyek dan institusi pemerintah. Dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional disebutkan bahwa pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan dampak kebijakan desentralisasi fiskal telah banyak dilakukan oleh ahli ekonomi. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti, yaitu diantaranya lokasi, dan data yang disajikan.

Penelitian Adam B. Elhiraika di Afrika Selatan pada tahun 2007 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih tergantung pada dana transfer pemerintah pusat dan pendapatan asli daerah belum memiliki peran penting bagi penyediaan layanan publik. Di Korea pada tahun 2003, Osung Kwon melakukan penelitian tentang dampak desentralisasi fiskal dengan hasil bahwa desentralisasi fiskal mempunyai peran penting dalam menentukan kesesuaian antara permintaan masyarakat terhadap barang publik dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Di Indonesia sendiri ada beberapa penelitian terkait dengan desentralisasi fiskal

dan dampaknya terhadap penyediaan barang publik, diantaranya penelitian Brahmatio dan Tri Wibowo di Surakarta yang menunjukkan bahwa setelah penerapan desentralisasi fiskal pemerintah daerah belum mampu mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) rasionya lebih banyak pada belanja rutin, bukan untuk belanja publik.

Penelitian Dina Agustina pada tahun 2010 di Jawa Tengah menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh signifikan positif pada outcome angka melanjutkan dan mengurangi angka kematian bayi di Jawa Tengah.

Berikut dibawah ini disajikan ringkasan dari beberapa penelitian terdahulu, diantaranya

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Sumber)	Judul	Tujuan Penelitian	Metodologi Penelitian	Hasil / Kesimpulan
1.	Adam B. Elhiraika, (African Trade Policy Centre, February 2007)	Fiscal Decentralization and Public Service Delivery in South Africa	Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana dampak desentralisasi fiskal terhadap penyediaan layanan dasar. 2. Mengetahui peran pendapatan asli daerah terhadap penyediaan barang publik/layanan dasar	1. Sebagai <i>dependent variable</i> adalah variabel E (education/pendidik an) dan H (health/kesehatan), sedangkan independen variabel antara lain OS (Own Source/pendapatan asli daerah), TR (Transfer Pemerintah Pusat), Y (pendapatan per kapita) 2. Estimasi model yang digunakan adalah dengan data cross-section dari	Hasil dari penelitian ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah dan transfer pemerintah pusat tidak mempunyai dampak yang penting pada pendidikan di seluruh provinsi. Pemerintah daerah di Afrika Selatan hanya mempunyai sedikit ruang untuk mengatur sumber pemasukan dan mengalokasikan pengeluaran, berdasarkan hal tersebut mereka menjadi kurang responsif

				sembilan provinsi di Afrika Selatan pada periode 1996-2005, model di estimasi menggunakan random effects dan fixed effects.	terhadap kebutuhan penduduk lokal dan juga kurang akuntabel terhadap meraka
2.	Agus Purwantoro, Tesis Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta, 2007	Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Publik Kabupaten/Kota di Pulau Jawa	Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki pengaruh komponen-komponen desentralisasi fiskal terhadap pendapatan asli daerah dan belanja publik. Komponen desentralisasi fiskal yang digunakan meliputi dana perimbangan, pinjaman daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk menguji hipotesis yang ada dalam penelitian ini digunakan regresi sederhana. 2. Variabel dependen yang digunakan adalah pendapatan asli daerah dan belanja publik, sedangkan variabel independen yang digunakan antara lain, dana perimbangan, pinjaman daerah, dan penerimaan lain-lain yang sah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hasil dari penelitian ini mendukung adanya pengaruh positif pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap pendapatan asli daerah dan peningkatan belanja publik pada kabupaten/kota di Pulau Jawa. 2. Kehadiran dana perimbangan berpengaruh positif terhadap besaran PAD. Transfer dari pemerintah pusat ini tidak membuat pemerintah daerah mengandalkan sumber

					<p>dana belanjanya dari dana transferynya</p> <p>3. Delegasi kewenangan pusat ke daerah dalam menentukan prioritas pembangunan dan merencanakan anggaran belanjanya di respon secara positif oleh daerah.</p>
3.	Brahmatio Isdijoso dan Tri Wibowo (Kajian Ekonomi dan Keuangan, Vol 6, No. 1, Maret 2002)	Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus: Sektor Pendidikan di Kota Surakarta)	Pelaksanaan studi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan mendokumentasikan respon daerah Kota/Kabupaten terhadap rancangan desentralisasi fiskal yang diimplementasikan pada awal 2001 dan implikasi respon daerah terhadap desentralisasi fiskal pada bidang	1. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan komparatif. Penggunaan metode tersebut dimaksudkan untuk melihat gambaran sektor pendidikan dari sisi alokasi dan pelaksanaan anggaran serta membandingkan kondisi tersebut antara sebelum dan	<p>1. Awal pelaksanaan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah belum mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Daerah lebih mengutamakan kondusifitas iklim usaha dibanding memungut pajak dan retribusi daerah dalam jangka pendek.</p> <p>2. Dana Alokasi Umum menjadi penyangga utama pembiayaan APBD yang sebagian</p>

			pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta	<p>pada saat otonomi daerah dilaksanakan.</p> <p>2. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder terkait APBD, Penjabaran Penerimaan, Penjabaran Belanja Rutin, Penjabaran Belanja Pembangunan, Nota Keuangan, realisasi APBD, serta literatur lainnya</p>	<p>besar terserap untuk belanja rutin.</p> <p>3. Keberpihakan pemerintah daerah terhadap sektor pendidikan terutama yang menyangkut anggaran pembangunan, pada awal pelaksanaan otonomi daerah mengalami penurunan. Prioritas utama Sektor pendidikan diarahkan untuk terpenuhinya belanja pegawai untuk kenaikan gaji dan rapel para guru, agar tidak terjadi pemogokan guru.</p>
4.	Osung Kwon, (Public Budgeting & Finance, Fiscal Decentralization in Korea, Winter,	The Effects of Fiscal Decentralization on Public Spending: The Korean Case	Secara spesifik penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah desentralisasi fiskal memberikan dampak	1. Untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model dari Grossman dengan menggunakan data	1. hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam meningkatkan kesesuaian antara

	2003)		terhadap besarnya anggaran publik di Korea.	<p>time series yang diregresi dengan OLS</p> <p>2. Penelitian ini menggunakan variabel dependen CE = rasio pengeluaran pemerintah pusat terhadap GDP, LE = rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap GDP, TE = rasio total pengeluaran pemerintah terhadap GDP, Dan variabel independen DEC = rasio pengeluaran pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah. Variabel kontrol yang digunakan adalah INCOME (pendapatan</p>	<p>penentuan barang publik dan permintaan masyarakat di Korea</p> <p>2. desentralisasi fiskal juga berperan sebagai pembatas bagi pemerintah pusat untuk melakukan maksimisasi penerimaan.</p>
--	-------	--	---	---	--

				perkapita), POP (jumlah penduduk) dan GRANT (transfer pemerintah).	
5.	Dina Agustina (Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010)	Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Angka Kematian Bayi dan Angka Melanjutkan SMP/MTs Periode 2007-2009 (Studi Kasus: Jawa Tengah)	Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka kematian bayi di Kabupaten/Kota pada Prov. Jawa Tengah dalam periode 2007-2009 2. Untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal terhadap angka melanjutkan SMP/MTs di Kabupaten/Kota pada Prov. Jawa Tengah dalam periode 2007-2009 3. Untuk menemukan	1. Penelitian ini menggunakan analisis data panel terhadap 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama 2007-2009 untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap AKB dan AM-SMP/MTs. 2. penelitian ini juga menggunakan analisis jalur/path analysis untuk mengetahui apakah variabel desentralisasi fiskal memiliki pengaruh terhadap AKB dan AM SMP/MTs	1. Variabel desentralisasi fiskal yang diestimasi menggunakan sisi pendapatan (PAD) berpengaruh negatif terhadap angka kematian bayi, sedangkan yang diukur dengan rasio sisi pengeluaran pemerintah daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kematian bayi. 2. variabel desentralisasi yang diestimasi dari sisi rasio pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka melanjutkan, sedangkan variabel desentralisasi yang

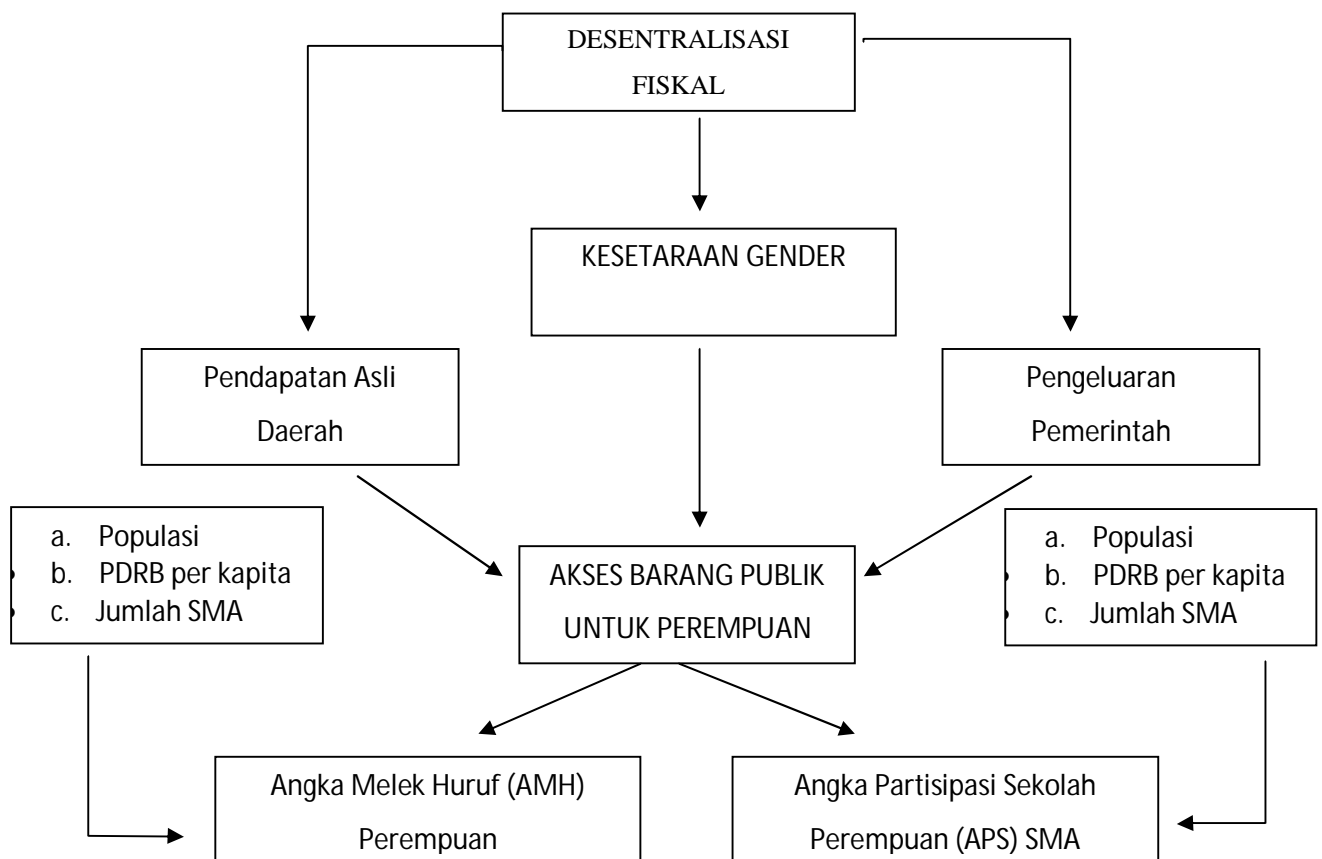
			ukuran derajat desentralisasi fiskal yang dapat menggambarkan derajat desentralisasi fiskal di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.		di ukur melalui rasio pengeluaran memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap angka melanjutkan. 3. penelitian ini juga menyatakan bahwa indikator desentralisasi fiskal yang tepat dalam menggambarkan derajat desentralisasi fiskal adalah indikator yang diestimasi dari sisi pendapatan
6.	Hiroko Uchimura & Johannes Jutting (IDE-JETRO & OECD)	Fiscal Decentralization and Health: A Case of China	Penelitian ini bertujuan untuk mengukur apakah desentralisasi berjalan baik diukur dengan perannya mengurangi angka kematian, dibandingkan dengan provinsi yang memainkan peran besar dalam menentukan layanan	Penelitian ini menggunakan data panel untuk mengestimasi dampak desentralisasi fiskal pada outcome kesehatan. Variabel dependen yang dipakai adalah outcome kesehatan yang diukur dengan	Hasil empiris yang diperoleh menunjukkan pentingnya tercukupinya transfer pemerintah untuk mencapai outcome kesehatan yang lebih baik. Analisis membuktikan bahwa meningkatkan transfer pemerintah dan memperkuat kapasitas

			<p>publik Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui peran apa yang dilakukan dana transfer terhadap outcome kesehatan</p>	<p>tingkat kematian per seribu angka kelahiran hidup pada tingkat provinsi. Sedangkan variabel explanatory yang pertama adalah desentralisasi fiskal dan yang kedua adalah karakteristik sosioekonomis yang akan berpengaruh terhadap outcome kesehatan seperti tingkat pendidikan dan angka kelahiran pada setiap provinsi.</p>	<p>fiskal diperlukan untuk mendapatkan outcome kesehatan yang lebih baik.</p>
--	--	--	---	--	---

2.3. Kerangka Pemikiran

Selanjutnya dengan memperhatikan dan menyimak latar belakang permasalahan serta beberapa kajian literatur tersebut, maka dapat disusun kerangka konseptual dari kajian ini, sebagai berikut :

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS



Desentralisasi fiskal dianggap sebagai alat untuk mendekatkan pengambilan kebijakan penyediaan barang publik agar lebih efisien dan sesuai dengan permintaan masyarakat diharapkan mampu membuka akses barang publik bagi perempuan. Di Indonesia desentralisasi fiskal tercermin dalam kebijakan

pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Berdasarkan indikator yang digunakan oleh UNDP bahwa untuk mengukur kesetaraan gender pada akses pendidikan dapat dilihat dari Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan. Maka dalam penelitian ini diharapkan mampu menganalisis dampak dari desentralisasi fiskal yang tercermin melalui pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap angka melek huruf perempuan dan angka partisipasi sekolah perempuan.

2.4. Hipotesis

Desentralisasi dimaksudkan agar penyediaan barang publik lebih efisien, karena pemerintah daerah dianggap mampu menyediakan barang publik sesuai dengan kondisi wilayah dan permintaan penduduk akan barang publik. Akses pada sumber daya dan pelayanan untuk pembangunan adalah beberapa cara untuk menilai dampak dari desentralisasi fiskal. Pada tingkat daerah kebanyakan layanan yang disediakan adalah *quasi public goods* – barang yang manfaatnya dirasakan bersama dan dikonsumsi bersama tetapi dapat terjadi kepadatan dan dijual melalui pasar atau langsung oleh pemerintah (Guritno; 2001). Pada kondisi tersebut, penting untuk mengalokasikan sumber daya secara cermat untuk memastikan akses layanan publik pada “*disadvantages group*” yang dimana perempuan termasuk di dalamnya dapat terpenuhi.

Berbagai studi telah dilakukan untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pelayanan publik. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina

(2011) berkesimpulan bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh dalam menurunkan angka kematian bayi dan angka melanjutkan pada tingkat SMP. Dalam penelitian lain Osung Kwon (2003) menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal memainkan peran penting dalam menentukan kesesuaian antara permintaan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik oleh pemerintah. Uchimura dan Jutting (2007) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa dengan desentralisasi fiskal diperoleh outcome kesehatan yang lebih baik di China.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan teori yang ada maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Melek Huruf (AMH) Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.
2. Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) Perempuan tingkat SMA/MA di Kabupaten/Kota Provinsi DIY.

BAB III

METODE PENELITIAN

Rancangan model penelitian ini untuk mengukur pengaruh desentralisasi fiskal terhadap indikator kesehatan dan pendidikan mengadopsi model penelitian yang dikembangkan oleh Kwon di Korea pada tahun 2003 dan Uchimura di China pada tahun 2009, yang variabel penelitiannya dalam penelitian ini disesuaikan dengan indikator MDGs tentang menghilangkan ketimpangan gender di semua tingkat pendidikan dengan indikator Angka Melek Huruf Perempuan dan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di tingkat SMA/MA dengan studi kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

5.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Dalam penelitian ini untuk mengukur indikator hasil akhir yang merupakan indikator dari kesetaraan gender di bidang pendidikan adalah angka partisipasi sekolah anak perempuan terhadap anak laki-laki (APS) di tingkat pendidikan lanjutan dan tinggi, dan angka melek huruf perempuan (AMH) pada usia 15-24 tahun. Variabel independen yang berpengaruh terhadap outcomes kesetaraan gender di bidang pendidikan ini adalah variabel desentralisasi dilihat dari sisi pendapatan (DECPAD) dan desentralisasi fiskal dari sisi pengeluaran (DECEXP). Sedangkan yang digunakan sebagai kontrol variabel adalah Populasi (POP), PDRB per kapita (Y), dan jumlah sekolah (JS).

3.1.1. Angka Partisipasi Sekolah Perempuan tingkat SMA/MA

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan, dapat dilihat dari penduduk yang masih sekolah pada umur tertentu yang lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS). Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Dalam penelitian ini yang diambil lebih spesifik pada Angka Partisipasi Sekolah Perempuan pada usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang SMA/MA.

3.1.2. Angka Melek Huruf Perempuan

Merupakan indikator pendidikan selain rata-rata lama sekolah, angka melek huruf merupakan gambaran dari pembangunan bidang pendidikan, dalam implementasi perhitungannya didasarkan pada persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang mampu membaca dan menulis huruf latin dan huruf lainnya. Angka melek huruf perempuan diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender).

3.1.3. Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal dalam penelitian ini diukur dengan metode yang digunakan oleh Kwon (2003) dan Uchimura (2009), Desentralisasi fiskal diartikan sebagai kemampuan suatu daerah untuk meningkatkan pendapatan

dari pajak daerah, dan sumber keuangan lain yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Kwon (2003) dan Uchimura (2009) menganggap pengeluaran pemerintah daerah yang meningkat sebagai salah satu bentuk desentralisasi fiskal, hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sesuai dengan penyerahan dan pelimpahan wewenang pemerintahan (*money follow function*). Selanjutnya dalam penelitian ini ukuran desentralisasi dapat diformulasikan sebagai berikut:

1. Derajat Desentralisasi Fiskal Dari Sisi Pendapatan (DECPAD)

Ketersediaan sumber daya fiskal merupakan kemampuan murni yang berasal dari daerah yaitu PAD. Rasio PAD terhadap total penerimaan daerah ini mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam satuan desimal. Rasio desentralisasi fiskal ini dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$DECPAD = \frac{PAD}{TPD}$$

Dimana:

DECPAD = Derajat desentralisasi fiskal dari sisi pendapatan

PAD = Pendapatan asli daerah

TPD = Total penerimaan daerah

2. Derajat Kemandirian Daerah Dari Sisi Pengeluaran (DECEXP)

Derajat desentralisasi fiskal yang diukur dari sisi pengeluaran daerah merupakan konsep yang menunjukkan jumlah anggaran yang

dibutuhkan daerah dalam menjalankan proses pembangunan, baik untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Derajat kemandirian daerah (DECEXP) ini dilambangkan sebagai rasio total pengeluaran pemerintah daerah terhadap pengeluaran pemerintah provinsi dalam satuan desimal diformulasikan sebagai berikut:

$$DECEXP = \frac{PPD}{TPProv}$$

Dimana:

DECEXP = Derajat kemandirian daerah dari sisi pengeluaran

PPD = Total pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota

TPProv = Total pengeluaran pemerintah provinsi

3.1.4. Populasi Penduduk

Populasi adalah jumlah penduduk di suatu daerah, dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk yang berada di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2004-2009

3.1.5. PDRB per Kapita

PDRB per kapita dapat digunakan sebagai gambaran rata-rata pendapatan yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah atau daerah. PDRB per kapita diperoleh dari hasil pembagian antara PDRB dengan jumlah penduduk.

3.1.6. Jumlah Sekolah

Jumlah sekolah adalah jumlah total SMA/MA yang berada di kabupaten/kota yang dijadikan sebagai objek penelitian.

5.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder berbentuk data panel (pooled data). Data panel dalam penelitian ini merupakan gabungan data *time series* dari tahun 2004 sampai tahun 2009, dan data *cross section* yang terdiri dari 5 Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Angka melek huruf perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
2. Angka partisipasi murni perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Angka partisipasi sekolah perempuan pada tingkat SMA di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Realisasi Dana Perimbangan di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

8. PDRB per kapita di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta
9. Populasi penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta

5.3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dan informasi yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dan informasi dengan cara mempelajari buku-buku terbitan pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BPS, dinas pendidikan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinas instansi terkait, artikel-artikel, jurnal-jurnal, dan buku-buku yang mempunyai relevansi dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui perpustakaan dan *download* internet.

5.4. Metode Analisis

Kajian penelitian ini menggunakan data panel dari lima kabupaten/kota yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dari periode 2004-2009. Tipe data ini dipilih agar dapat menghitung perbedaan antar kabupaten/kota. Sarys dalam Mudrajad Kuncoro (2004) mengatakan bahwa data panel adalah kombinasi antara data runtut waktu, yang memiliki observasi temporal biasa pada suatu unit analisis, dengan data silang tempat, yang memiliki observasi-observasi pada pada suatu unit analisis pada suatu titik waktu tertentu.

UNDP dalam *Millenium Development Goals (MDGs)* untuk mengukur target menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan dasar dan

lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang pendidikan tidak lebih dari tahun 2015 dipantau dengan menggunakan indikator rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki usia 15-24 tahun, yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki-laki (indeks paritas melek huruf gender). Sedangkan untuk mengukur seberapa besar akses perempuan terhadap fasilitas pendidikan, diukur dengan jumlah penduduk perempuan yang masih sekolah pada usia 16-18 atau lebih dikenal dengan Angka Partisipasi Sekolah Perempuan (APS).

Berdasarkan indikator tersebut penelitian ini menggunakan persamaan estimasi yang mereplikasi dari penelitian dari Uchimura dan Jutting (2009) di China sebagai berikut:

$$AMHPer = a_1 + a_2DECPAD + a_3Y + a_4Pop + a_5JS + u \quad (1)$$

$$AMHPer = b_1 + b_2DECEXP + b_3Y + b_4Pop + b_5JS + u \quad (2)$$

$$APSPer = c_1 + c_2DECPAD + c_3Y + c_4Pop + c_5JS + u \quad (3)$$

$$APSPer = d_1 + d_2DECEXP + d_3Y + d_4Pop + d_5JS + u \quad (4)$$

Dimana,

AMHPer = Angka Melek Huruf Perempuan

APSPer = Angka Partisipasi Sekolah Perempuan di SMA/MA

DECPAD = Derajat desentralisasi fiskal yang diukur melalui sisi pendapatan

DECEXP = Derajat kemadirian daerah yang diukur dari sisi pengeluaran

Pop = Jumlah penduduk

Y = Regional GDP per kapita (produk domestik regional bruto)

JS = Jumlah Sekolah

u = error terms

5.4.1. Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik

Secara teoritis telah diungkapkan bahwa salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah Ordinary Least Square (OLS). Metode OLS digunakan berlandaskan pada sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi, pada prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUE (Best, Linear, Unbiased, dan Estimator), dalam pengertian lain model yang dibuat harus lolos dari penyimpangan asumsi adanya normalitas, autokorelasi, heterokedastisitas, dan multikolinearitas.

1. Deteksi Normalitas

Deteksi normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal (Santoso,

2005). Normalitas dapat dideteksi dengan menggunakan uji *Jarque-Bera* (JB) dan metode grafik. Penelitian ini akan menggunakan metode J-B test yang dilakukan dengan menghitung perbedaan skewness dan kurtosis data. Apabila J-B hitung $<$ nilai X^2 (Chi Square) tabel atau probabilitas melebihi 0.05, maka nilai residual berdistribusi normal.

2. Deteksi Autokorelasi

Deteksi ini dipakai untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode (t) dengan kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya ($t-1$). Jika terjadi korelasi maka dinamakan autokorelasi. Deteksi terhadap autokorelasi pada penelitian ini menggunakan statistik d Durbin Watson.

Durbin Watson menawarkan batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U) sedemikian hingga jika nilai d yang dihitung dari persamaan berada di luar batasan tersebut dapat diambil keputusan ada atau tidaknya autokorelasi. Batas atas dan bawah ini tergantung jumlah observasi (n) dan jumlah variabel penjelas (k).

Penelitian ini menggunakan variabel penjelas empat dan jumlah observasi tiga puluh, sehingga diperoleh batas bawah (d_L) sebesar 1,143 dan batas atas (d_U) dengan nilai 1,739 pada tingkat signifikansi 5%.

3. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas mempunyai arti adanya hubungan linear yang sempurna atau pasti antara beberapa atau semua variabel independen dalam model regresi. Adanya multikolinearitas dalam model persamaan regresi yang digunakan akan mengakibatkan ketidaktepatan estimasi sehingga mengarah pada kesimpulan yang menerima hipotesis nol. Hal ini menyebabkan koefisien regresi menjadi tidak signifikan dan standar deviasi sangat sensitif terhadap perubahan (Gujarati, 2003).

Deteksi multikolinearitas dapat dideteksi dengan cara regresi auxiliary. Regresi jenis ini dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua atau lebih variable independent yang secara bersama-sama mempengaruhi satu variable independent. Regresi auxiliary dilakukan terhadap beberapa variable independent yang ada, dimana salah satu diantaranya dijadikan variable dependent dan lainnya sebagai variable independent secara bergantian. Dalam penelitian ini digunakan koefisien korelasi antar variabel independen untuk menguji ada atau tidaknya multikolinearitas pada model.

4. Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah adanya varian yang berbeda yang dapat membiaskan hasil yang telah dihitung. Konsekuensi yang timbul adalah adanya *formula ordinary least square* yang akan menaksir terlalu rendah varian yang sesungguhnya. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi terjadi ketidaksamaan varian

dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka hal tersebut disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang bersifat homoskedastisitas atau dengan kata lain tidak terjadi heteroskedastisitas.

Dalam penelitian ini digunakan uji White untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas. Dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas antara lain dengan menggunakan uji *white*. Uji *white* dapat menjelaskan apabila nilai probabilitas $Obs \cdot R^2$ lebih kecil dari α (5%) maka data bersifat heteroskedastisitas begitu pula sebaliknya.

5.4.2. Pengujian Hipotesis

Metode analisis pengujian hipotesis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data panel diperkenalkan oleh Howles pada tahun 1950. Dalam pengujian hipotesis pada penelitian menggunakan pendekatan *Panel least square (PLS)*, *fixed effect*, dan *random effect*. Setelah dilakukan estimasi data panel dengan menggunakan ketiga pendekatan tersebut, hasil terbaik dipilih berdasarkan kriteria bebas penyimpangan asumsi klasik. Selain pemenuhan bebas penyimpangan asumsi klasik, model terbaik juga dipilih berdasarkan uji Hausman. Uji Hausman

dilakukan untuk memilih pendekatan terbaik antara *fixed effect* dan *random effect* dalam model persamaan regresi. Estimasi regresi data panel dalam penelitian ini akan dibantu dengan menggunakan *software* Eviews 5.1

5.4.2.1. Panel Least Square

Teknik yang digunakan dalam metode Panel Least Square adalah dengan mengkombinasikan data time series dan cross section. Dengan hanya menggabungkan kedua jenis data tersebut maka dapat digunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, dan dapat diasumsikan bahwa perilaku data sama dalam berbagai rentang waktu. Asumsi ini sangat jauh dari realita sebenarnya, karena karakteristik dari segi kewilayahan jelas berbeda.

5.4.2.2. Fixed Effect Methods

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Fixed Effect. Metode dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Metode ini mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar wilayah dan antar waktu, namun intersepnya berbeda antar wilayah namun sama antar waktu (time invariant). Namun metode ini membawa kelemahan yaitu berkurangnya derajat kebebasan (degree of freedom) yang akhirnya mengurangi efisiensi parameter.

5.4.2.3. Random Effect Methods

Teknik yang digunakan dalam metode *random effect* adalah dengan menambahkan variabel gangguan (error terms) yang mungkin saja akan muncul pada hubungan antar waktu dan antar kabupaten/kota. Teknik metode

OLS tidak dapat digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien, sehingga lebih tepat untuk menggunakan metode *Generalized Least Square* (GLS).

5.4.3. Analisis Regresi

Uji signifikansi merupakan prosedur yang digunakan untuk menguji kebenaran atau kesalahan dari hasil hipotesis nol dari sample. Ide dasar yang melatarbelakangi pengujian signifikansi adalah uji statistik (uji estimator) dari distribusi *sample* dari suatu statistik dibawah hipotesis nol. Keputusan untuk mengolah H_0 dibuat berdasarkan nilai uji statistik yang diperoleh dari data yang ada (Gujarati, 2003). Ketepatan fungsi regresi dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari goodness of fit. Secara statistik goodness of fit dapat diukur dari nilai koefisien determinasi (R^2), uji signifikansi parameter secara bersamaan (uji F), dan uji signifikansi secara individual (uji t).

1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar variasi dari variabel dependen dapat dijelaskan dengan variasi dari variabel independen, dimana nilai R^2 mempunyai rentang nilai 0 sampai dengan 1.

Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai R^2 yang mendekati satu memiliki arti bahwa variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Kelemahan mendasar menggunakan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model.

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Oleh karena itu banyak penelitian menganjurkan untuk menggunakan nilai adjusted R^2 pada saat mengevaluasi mana model regresi terbaik. Tidak seperti R^2 , nilai adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan dalam model.

2. Pengujian koefisien regresi secara serentak (Uji F)

Uji F digunakan untuk menentukan signifikan atau tidak signifikannya suatu variabel bebas secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel tidak bebas. Atau dengan kata lain apakah semua *variable independen* atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap *variabel dependen*/terikat. Hipotesis yang digunakan dalam pelaksanaan uji F adalah sebagai berikut:

Ho: semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol

H1 : tidak semua koefisien slope secara simultan sama dengan nol

Dari hipotesis diatas memiliki arti apakah semua *variabel independen* bukan merupakan penjelas yang signifikan terhadap *variable dependen*. Sedangkann hipotesis alternatifnya (H1) tidak semua parameter secara simultan sama dengan nol. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan yaitu membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika hasil perhitungan ternyata, F_o (F -observasi) $<$ F_t (F -tabel), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. Bila terjadi keadaan demikian, maka dapat dikatakan

bahwa variasi dalam model regresi tidak berhasil menerangkan variabel bebasnya. Sebaliknya jika F_o (F-observasi) $>$ F_t (F-tabel) maka dapat dikatakan hipotesis nol (H_0) ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Dalam keadaan demikian berarti variasi dalam model regresi dapat menerangkan variable bebasnya. Atau apabila prob. F-statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan lima persen (prob. F-statistik $<$ 0,05), maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variable-variable dalam model regresi berhasil menerangkan variable dependennya

3. Pengujian koefisien regresi secara individual (Uji t)

Uji ini digunakan untuk melihat signifikansi dari pengaruh *variable independen* terhadap *variabel dependen* secara individual dalam hal ini dapat ditetapkan hipotesis sebagai berikut :

$$H_0 : \beta_i = 0$$

$$H_1 : \quad 1. \beta_i < 0$$

$$2. \beta_i > 0$$

Apabila t_o (tobservasi) $<$ t_t (ttable), maka hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_1) ditolak. Dengan kata lain model yang digunakan kurang baik. Artinya variable bebas tidak dapat menerangkan variabel terikatnya atau tidak signifikan. Sebaliknya jika t_o (t-observasi) $>$ t_t (t-table), maka dapat dikatakan bahwa variable bebas dapat menerangkan variable terikatnya atau signifikan. Atau apabila Prob. t-statistik lebih kecil dari tingkat kepercayaan yang telah ditetapkan, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *variable independen* dapat menerangkan

variabel dependennya. Dan sebaliknya apabila prob.t-statistik lebih besar dari derajat kepercayaan yang telah ditetapkan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan dapat disimpulkan bahwa *variable independen* tersebut tidak dapat menerangkan variabel dependennya atau tidak signifikan.

5.4.4. Uji Hausman

Pada model panel data untuk mengetahui apakah model yang digunakan *fixed effect* atau *random effect* dapat menggunakan beberapa pertimbangan

- a. Bahwa *Random Effect* mempunyai parameter lebih sedikit; akibatnya derajat kebebasannya lebih besar, dibanding *Fixed Effect* yang mempunyai parameter lebih banyak sehingga derajat kebebasannya lebih kecil
- b. Akan tetapi *Fixed Effect* juga mempunyai beberapa kelebihan, seperti, *Fixed Effect* dapat membedakan efek individual dan efek waktu, dan *Fixed Effect* juga tidak perlu mengasumsikan bahwa komponen error tidak berkorelasi dengan variabel bebas yang mungkin sulit dipenuhi.

Pengujian statistik sebagai dasar pertimbangan dalam memilih apakah menggunakan model *fixed effect* ataukah menggunakan *Random effect* dapat dilakukan dengan Hausman Test. Dalam Hausman Test penggunaan model *fixed effect* mengandung unsur *Trade off* yaitu hilangnya derajat kebebasan dengan memasukkan variable *dummy*. Dalam pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut :

$H_0 = \text{Random effect model}$

$H_1 = \text{fixed effect model}$

Sebagai dasar penolakan hipotesis nol tersebut digunakan pertimbangan statistik Chi square. Hausman test dapat dilakukan dengan program eviews 5.1. Jika hasil dari Hausman test signifikan (probability dari $hausman < \alpha$) maka H_0 ditolak, artinya *fixed effect* digunakan